



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSDMD



PPID
BPSDMD

Jateng
gayeng



TAHUN

2018

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja dibidang pengembangan sumber daya aparatur.

Dalam laporan PPID tahun 2018 ini digambarkan tentang Tata Kelola dan Tata Layanan Informasi Publik yang diawali dengan pengembangan portal Informasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> dan web khusus Informasi Publik di website <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid> Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID BPSDMD melalui website selain melalui akses langsung / desk Ruang Layanan Informasi.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga mencatat permohonan informasi yang terjadi pada tahun 2018. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan.

Pencapaian kinerja PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 cukup mengembirakan dengan meraih Predikat Badan Publik Informatif dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada bulan Desember 2018.

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Semarang, Desember 2018

**Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu,

HERMOYO WIDODO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19651021 199403 1 006

LAPORAN TAHUNAN
PPID PEMBANTU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID pada badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menandakan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik khususnya dibidang kediklatan aparatur, sesuai dengan yang tercantum di Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan sosialisasi PPID lingkup BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sejak awal tahun 2018 PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meluncurkan media khusus PPID dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid/> dengan maksud untuk memperkenalkan PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat yang berisi tentang pengertian singkat PPID, alur permohonan informasi, waktu layanan, form layanan dan leaflet PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan awal PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk membuka akses yang sebesar-besarnya terhadap informasi publik, mengingat sekarang merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap orang berhak tahu tentang program-program dan kinerja pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 27 Tahun 2015 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

9. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/03740/2018 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
10. Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800 / 00092 / 2018 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

III. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Profil PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Nama Instansi	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Jawa Tengah
PPID Pembantu	: Hermoyo Widodo, SH, M.Hum
Alamat	: Jl. Setiabudi 201 Semarang Kode Pos 50263
Telepon	: 024 7473066 ext. 666
Faksimile	: 024 7473701
Email	: bpsdmd@jatengprov.go.id
Website	: http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Website PPID	: http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid
Twitter	: @bpsdmdjtg
Instagram	: @bpsdmdjtg
Facebook	: @bpsdmdjtg
Whatsapp / sms	: 0811 281 5000

B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/003740/2018 tentang Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Tim Pelaksana PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
2. PPID Pembantu sebanyak 1 orang;
3. Pengelola Informasi sebanyak 12 orang;
4. Pelayanan Informasi sebanyak 5 orang;
5. Dokumentasi dan Arsip sebanyak 4 orang;
6. Pengaduan dan Penyelesaian sengketa sebanyak 6 orang.
7. Pengelola Teknologi Informasi sebanyak 5 orang

Untuk efektivitas pelayanan, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menetapkan 2 petugas frontliner yang bertugas sebagai pengelola Buku Tamu Digital dengan aplikasi SINTA (Sistem Informasi Tamu) yang terintegrasi dengan aplikasi e-public.

C. Sarana dan Prasarana

1. Pelayanan Informasi Publik

Untuk menjalankan tugasnya, telah disediakan Ruang Layanan Informasi yang sekaligus merupakan ruang sekretariat PPID, didalamnya dilengkapi fasilitas :

a. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Pusat Administrasi yaitu Graha Widya Praja berlokasi di Lobby Lantai I yang dijadikan sebagai Ruangan Khusus Layanan Informasi.

Ruangan Layanan Informasi Publik terdiri dari :

- 1) 4 unit meja dan kursi layanan informasi
- 2) 8 unit kursi layanan informasi
- 3) 4 unit komputer layanan informasi & 1 unit Laptop
- 4) 2 unit printer, 1 unit Scanner & 1 Harddisk Eksternal
- 5) 1 unit Kamera DSLR, 1 unit Handycam & 1 unit tripod
- 6) 1 rak dan 1 almari penyimpanan dokumen, CD/DVD dan Flashdisk / hard disk.
- 7) 1 unit TV Plasma 60 inch & 1 unit TV LED 40 inch
- 8) 2 nomor telepon ekstensi, 1 nomor WA Center
- 9) 1 unit akses point.

Gambar Ruang Desk Layanan Informasi dan Ruang Tunggu



b. Ruang Lobby

Sebagai bentuk pelayanan prima terhadap publik, Tim Pelaksana PPID didukung oleh 2 Petugas frontliner yang menjadi petugas terdepan dalam pelayanan informasi awal. Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Ruang Lobby didukung dengan fasilitas :

- 1) Meja Layanan
- 2) 1 unit PC Desktop untuk Aplikasi SINTA (Sistem Informasi Tamu) yang terintegrasi dengan aplikasi epublic
- 3) 2 nomor telepon, 1 nomor faksimile & 2 nomor ekstensi
- 4) 1 unit Interaktif Whiteboard untuk layanan sewa online dan survey kepuasan pelanggan

c. Ruang Tunggu

Untuk memberikan kenyamanan bagi publik, telah disediakan Ruang tunggu yang didukung fasilitas sebagai berikut :

- 1) 1 set meubelair
- 2) 1 unit kursi roda
- 3) 1 unit TV 32 inch dan 1 unit interaktif Whiteboard untuk media informasi dan publikasi.
- 4) Free hotspot.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan akses informasi sebagai berikut :

- a. Menu "PPID" di Portal Informasi BPSDMD dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
- b. Media Informasi Publik dengan alamat <http://bpsdmd.jatengprov.go.id/v2/ppid> yang didalamnya berisi tentang :
 - 1) Profil PPID
 - 2) Daftar dan Jenis Informasi Publik
 - 3) Mekanisme Layanan Informasi Publik
 - 4) Pelaporan Pengelolaan informasi Publik
 - 5) Link Open Data, Media Publikasi dan permohonan informasi
 - 6) Galeri Kegiatan
- c. Papan Pengumuman
Selain itu untuk menunjang pelayanan informasi publik disediakan pula leaflet informasi publik dan standing banner terkait pendaftaran peserta dan sewa gedung.
- d. Kotak Saran yang terletak di Ruang Lobby, Gedung Pendidikan, Perpustakaan dan Ruang Makan
- e. Layanan kepuasan masyarakat interaktif yang terletak di lobby Graha Widya Praja
- f. Leaflet dan Flyer informasi sebagai berikut :
 - 1) PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Hak Anda Untuk Tahu
 - 3) Techno Trainng Center
 - 4) Profil Lembaga
 - 5) Kegiatan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu
 - 6) Kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 7) Kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional

- 8) Kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
 - 9) Sarana Prasarana
 - 10) Profil Perpustakaan
 - 11) Eproper
 - 12) Sewa Gedung
- g. Banner tentang :
- 1) Anti Korupsi
 - 2) Visi Misi Gubernur
 - 3) Daftar Harga Gedung dan Asrama

3. Kebijakan ke-PPID-an :

- a. Menetapkan Visi dan Misi PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :
 - 1) Visi : Mewujudkan tata kelola informasi publik yang mudah, cepat dan murah
 - 2) Misi :
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung
 - b) Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
 - c) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis online
- b. Menetapkan Motto layanan PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah: " Pelayanan mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab. "
- c. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :

3) Pembuatan Aplikasi Baru

- Portal Aplikasi SIMAPAN-SDM berbasis flash
- Infografis Target dan Realisasi Keuangan dan Kegiatan
- Sistem Informasi Profil SDM
- Alona : Aplikasi Layanan Open Data
- Infografis : Aplikasi Data Sektoral BPSDMD
- Riwayat Kediklatan

4. Kegiatan ke-PPID-an :

a. Kegiatan Rutin PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

1) Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dihimpun di masing-masing bidang yang dikoordinir oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibantu Kepala Bidang melalui Petugas PPID di bidang masing-masing.

Adapun strategi yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan informais publik diantaranya melalui Pengiriman permohonan informasi kepada bidang yang menguasai informasi publik dan menugaskan staf untuk meminta / mendatangi langsung kepada sumber – sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah dapat legitimasi pimpinan.

Sedangkan informasi umum dan kegiatan PPID BSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah diunggah melalui portal informasi <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> dan portal informasi publik <http://bpsdmd/jatengprov.go.id/v2/ppid>

Pengolahan dokumen yang bersifat besar dan secara kuantitas banyak dilakukan dengan menyimpan di almari, demikian juga dengan softcopy tetap berada di bidang-bidang / unit kerja.

- 2) Penyusunan Daftar Informasi Publik
- 3) Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan – 30 Mei 2018
- 4) Dalam proses penyajian informasi kepada masyarakat, Tim PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan publikasi kegiatan melalui beberapa media :

a) Website resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai portal informasi kegiatan, Tim PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan publikasi kegiatan yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan pelatihan, observasi lapangan, praktek lapangan, benchmarking, sosialisasi, sinkronisasi, evaluasi, lokakarya dan seminar berupa berita kegiatan / news.

b) Website PPID

Untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik, Tim PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan update melalui unggah dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Pelaporan meliputi : LKjIP
- Dokumen Anggaran meliputi : RKA, DPA dan DPA Perubahan
- Dokumen Perencanaan, berupa Renstra, Renja, RKT, RKO
- Dokumen Keuangan meliputi : Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Keuanga, CALK dan Daftar Aset dan Inventaris.
- Dokumen Pendukung Kegiatan meliputi : SOP, KAK, Surat Keputusan, Dokumen Perjanjian Kerjasama, draft Keputusan
- Dokumen Agenda Kegiatan meliputi : Agenda Pimpinan dan Jadwal Pelatihan.
- Dokumen Ilmiah meliputi : Inovasi Kepemimpin, Karya

Tulis Ilmiah, Warta Diklat dan Jurnal Ilmiah Widya Praja.

- Data Peserta dan kelulusan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi melalui Open Data Jawa Tengah.

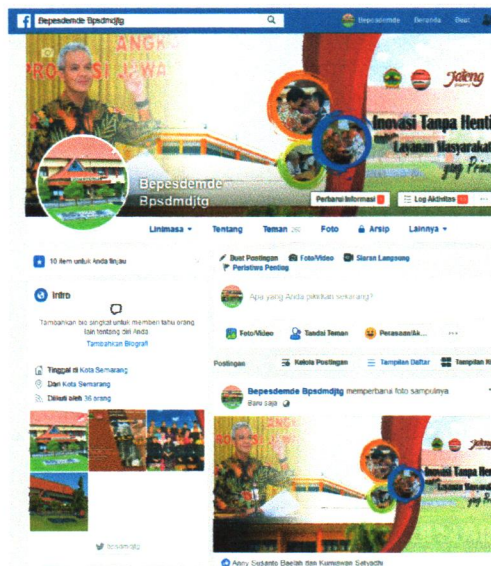
c) Media Sosial

Selama tahun 2018, Tim PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan publikasi informasi melalui media sosial :

- Instagram - @bpsdmdjtg



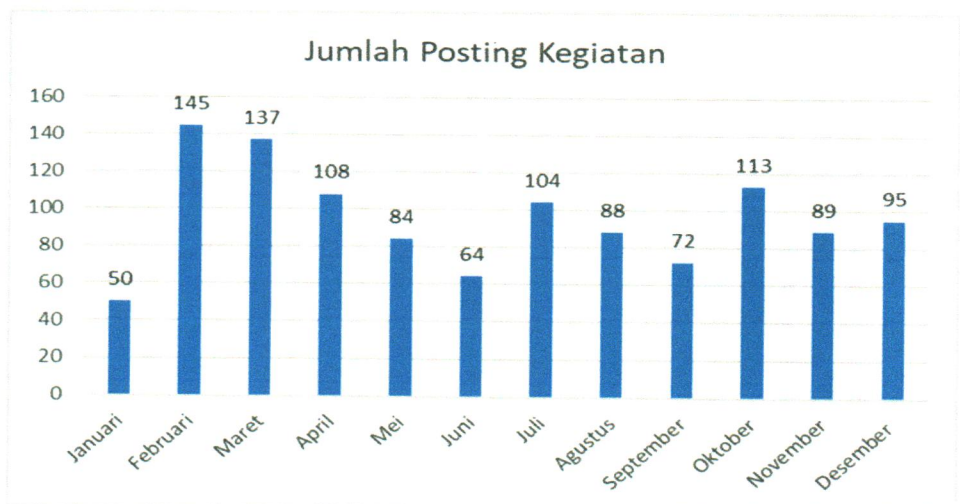
- Facebook - @bpsdmdjtg



- Twitter - @bpsdmdjtg



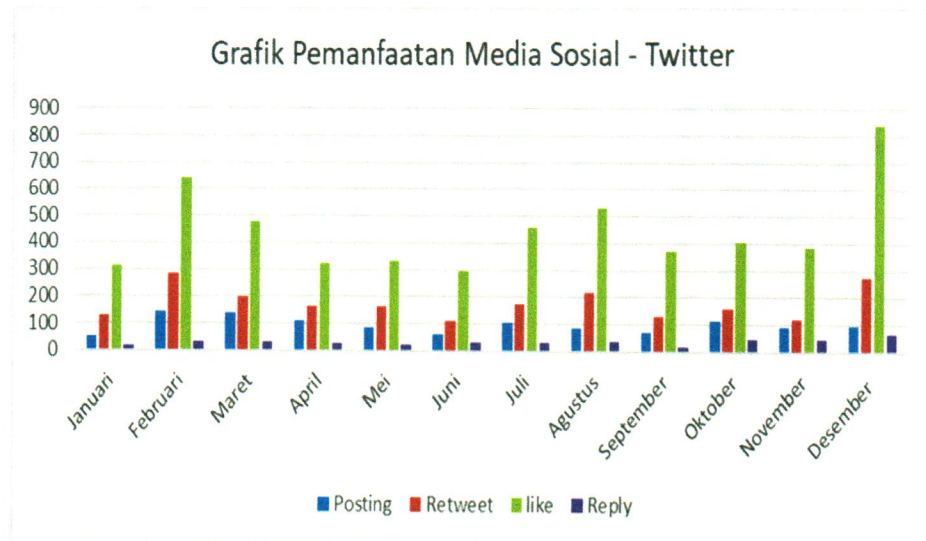
Sepanjang tahun 2018, Tim PPID BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan publikasi kegiatan melalui twitter sebanyak 1.149 postingan, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1. Rekapitulasi Publikasi kegiatan melalui twitter

Bulan	Posting	Retweet	like	Reply	Link-Click
Januari	50	131	311	20	84
Februari	145	284	640	32	123
Maret	137	195	475	33	68
April	108	163	323	30	97
Mei	84	165	333	24	105
Juni	64	110	294	32	51

Juli	104	175	458	34	90
Agustus	88	218	528	39	103
September	72	131	369	17	75
Oktober	113	156	405	48	73
November	89	120	387	47	39
Desember	95	276	839	66	101
Jumlah	1149	2124	5362	422	1009



b. Partisipasi dalam Kegiatan :

- 1) Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Klaten – 24 s.d 25 Januari 2018
- 2) Sinkronisasi Infrastruktur, Jaringan dan Integrasi Data - Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Sukoharjo – 10 s.d 11 April 2018.
- 3) Seminar Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Bebas KKN melalui Pilkada 2018, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang – 26 April 2018.
- 4) Dialog Optimalisasi Pelayanan Masyarakat di Jawa Tengah – Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Salatiga – 19 Juli 2018.

- 5) Bimtek Laporgub, Admin Android & Twitter Kemala, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Semarang – 19 September 2018.
- 6) Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Cilacap - 26 September 2018.
- 7) Peringatan RIGHT TO KNOW DAY melalui pemasangan spanduk dan publikasi melalui media sosial, Semarang – 28 September 2018.
- 8) Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi untuk OPD Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Kabupaten / Kota se Jawa Tengah, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Tlogo Tuntang, 24 Oktober 2018.
- 9) Seminar Keterbukaan Informais Publik “Mewujudkan Good Governance dalam Mendukung Implementasi Visi Jawa Tengah 2018 – 2023”, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang – 25 Oktober 2018.
- 10) Uji Publik dalam rangka Pemeringkatan Tata Kelola Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Universitas Semarang, 22 November 2018
- 11) Rakor dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan PPID, Semarang – 5 Desember 2018
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial SKPD dan BUMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang – 21 Desember 2018.

c. Pelayanan Permohonan Informasi dalam Kunjungan :

- 1) BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan - 18 Januari 2018
- 2) BAPPELKES DIY - 22 Maret 2018
- 3) SEKDA Tangerang - 10 April 2018
- 4) Badan Diklat Provinsi Bali - 23 April 2018

- 5) Pusdiklat Sumedang - 26 April 2018
- 6) BPSDMD Kalimantan Selatan - 9 Mei 2018
- 7) BNPB - 23 Mei 2018
- 8) BPSDM Provinsi Sumatera Utara - 28 Juni 2018
- 9) BPSDM Provinsi Jawa Barat - 5 Juli 2018
- 10) BPSDM Provinsi Banten - 19 Juli 2018
- 11) Balitbang Kota Magelang - 2 Agustus 2018
- 12) Pusdiklat Setneg RI - 30 Agustus 2018
- 13) PSDM Sukabumi - 18 September 2018
- 14) PPID Dinas Arsip & Perpustakaan Prov. Jateng - 3 Oktober 2018
- 15) BPSDM Provinsi Aceh - 16 Oktober 2018
- 16) Pusdiklat SDM LHK - 25 Oktober 2018
- 17) Badan Diklat Provinsi Bali - 6 Nopember 2018
- 18) Pusdik Kementerian Agama RI - 17 Desember 2018
- 19) Pusdiklat Kementerian PUPR - 19 Desember 2018
- 20) BKPPD Kab. Bandung - 21 Desember 2018

5. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan tata kelola informasi publik, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyediakan anggaran untuk kegiatan ke-PPID-an sebesar Rp. 382.993.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan PPID
- b. Pengelolaan Sistem Informasi
- c. Pembuatan Warta Diklat
- d. Pembuatan Jurnal Ilmiah
- e. Pencetakan Media Publikasi
- f. Pembuatan Film Dokumenter

IV. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 08.00 – 15.30 WIB sedangkan pada hari Jumat dari jam 08.00 – 16.00 WIB. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung dengan datang ke Ruang Layanan Informasi di Gedung Graha Widya Praja – BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi Nomor 201 A Semarang maupun tidak langsung melalui email ke alamat bpsdmd@jatengprov.go.id serta website resmi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> atau melalui jejaring sosial twitter, instagram dan facebook dengan akun @bpsdmdjtg

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 :

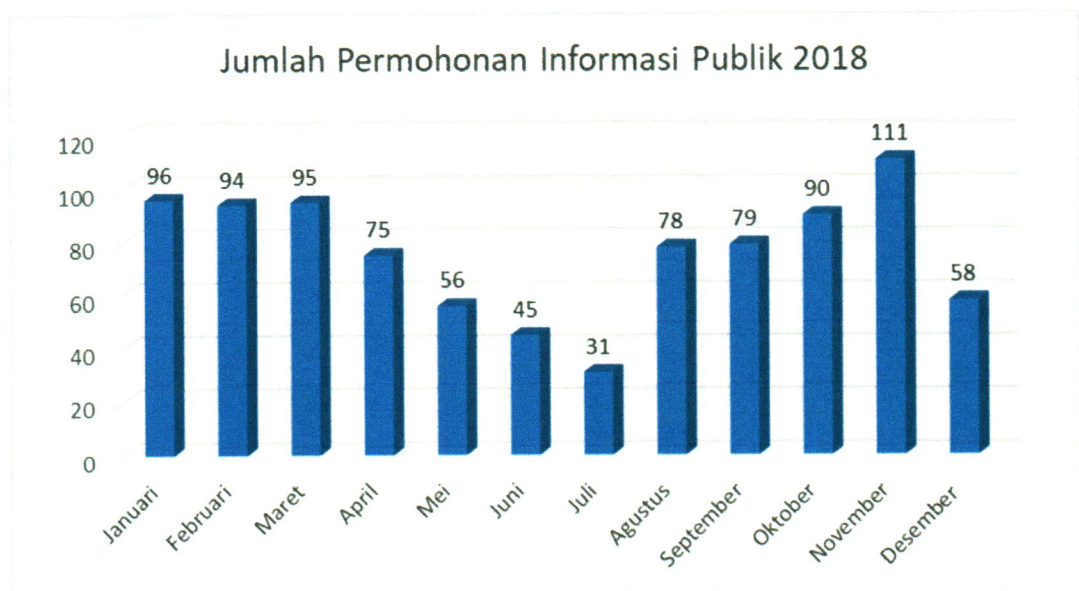
- a. Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2018 sebanyak 908 permohonan
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 908 dan yang ditolak 0 (tidak ada).
- c. Rincian layanan informasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 2. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2018

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	96	0	-	96
2	Februari	94	0	-	94
3	Maret	95	0	-	95
4	April	75	0	-	75
5	Mei	56	0	-	56
6	Juni	45	0	-	45
7	Juli	31	0	-	31
8	Agustus	78	0	-	78
9	September	79	0	-	79
10	Oktober	90	0	-	90

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
11	November	111	0	-	111
12	Desember	58	0	-	58
	Jumlah	908	0	-	908

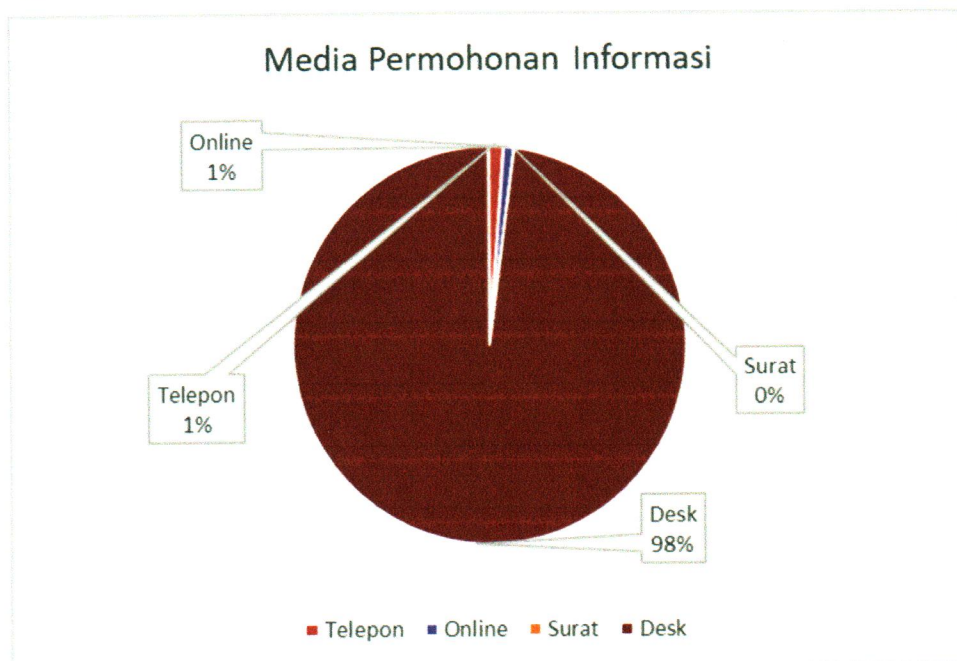
Secara keseluruhan Jumlah Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2018 dalam grafik berikut ini :



TABEL 3. REKAPITULASI PENGGUNAAN SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TAHUN 2018

No	Bulan	Telepon	Online	Surat	Desk	Jumlah
1	Januari	1	3	0	92	96
2	Februari	0	0	0	94	94
3	Maret	1	0	0	94	95
4	April	0	0	0	75	75
5	Mei	4	0	0	52	56
6	Juni	2	0	0	43	45
7	Juli	2	2	0	27	31
8	Agustus	1	2	0	75	78
9	September	0	0	0	79	79
10	Oktober	0	0	0	90	90
11	November	0	0	0	111	111
12	Desember	0	1	0	57	58
	Jumlah	11	8	0	889	908

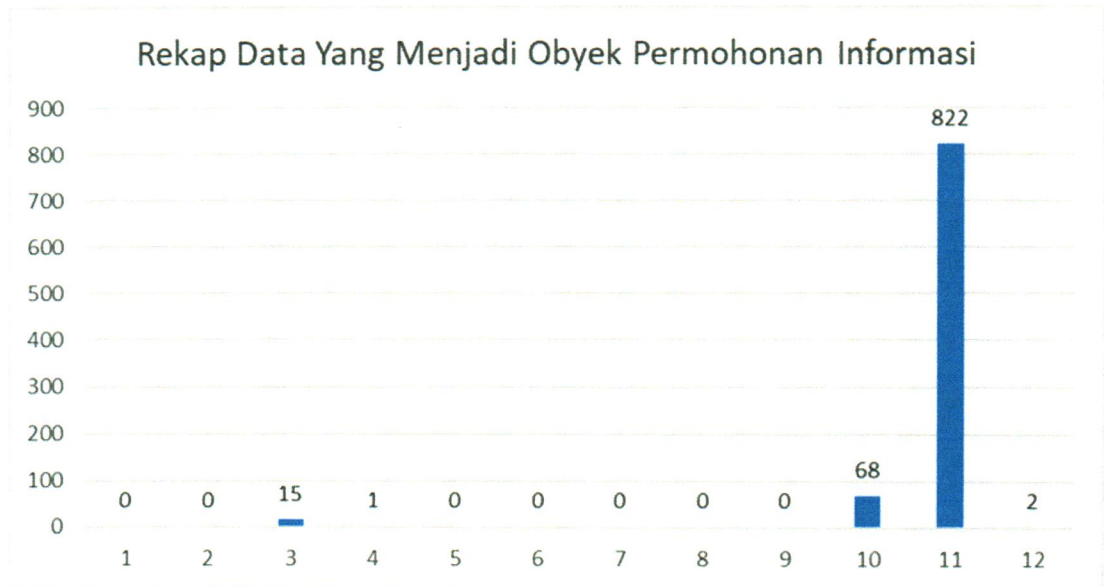
Secara keseluruhan Pemanfaatan Saluran Permohonan Informasi sepanjang Tahun 2018 dalam grafik berikut ini :



TABEL 4. REKAPITULASI PERMOHONAN JENIS INFORMASI PERIODE TAHUN 2018

No	Bulan	Klasifikasi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	88	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	90	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	89	1
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	72	0
5	Mei	0	0	4	0	0	0	0	0	0	7	45	0
6	Juni	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	41	0
7	Juli	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	0
8	Agustus	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	70	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	75	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	89	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	52	1
	Jumlah	0	0	15	1	0	0	0	0	0	68	822	2

Secara keseluruhan Rekapitulasi Permohonan Jenis Informasi yang dimohonkan sepanjang Tahun 2018 dalam grafik berikut ini :



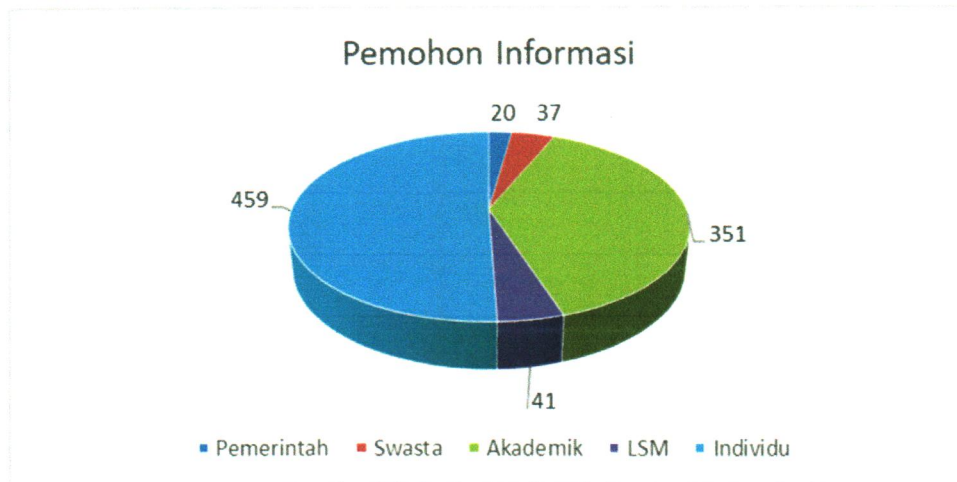
Keterangan :

- | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran | 5. Kerjasama Peny. Diklat | 9. Kunjungan |
| 2. Aset | 6. Keuangan | 10. Magang & Penelitian |
| 3. Diklat | 7. Sertifikasi Komp. | 11. Sewa |
| 4. Kegiatan | 8. SDM | 12. Lainnya |

**TABEL 5. REKAPITULASI KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI
PERIODE TAHUN 2018**

No	Bulan	Pemerintah	Swasta	Akademik	LSM	Individu
1	Januari	2	4	23	2	65
2	Februari	1	4	31	4	54
3	Maret	4	4	43	1	43
4	April	4	3	25	4	39
5	Mei	0	0	37	1	18
6	Juni	0	0	9	2	34
7	Juli	1	2	4	2	22
8	Agustus	2	5	30	5	36
9	September	2	5	38	3	31
10	Oktober	2	5	50	9	24
11	November	2	4	51	6	48
12	Desember	0	1	10	2	45
	Jumlah	20	37	35	41	459

Secara keseluruhan Rekapitulasi Pemohon Informasi sepanjang Tahun 2018 dalam grafik berikut ini :



d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2018, Tidak ada pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

VI. KENDALA DAN REKOMENDASI

A. Kendala pengelolaan informasi publik diantaranya :

1. Masih terdapat aparat yang belum memahami pentingnya penyediaan materi / informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk kategori dikecualikan,
2. Masih adanya aparatur sebagai penghasil informasi yang belum menganggap penting untuk penyampaian dokumen tentang informasi publik kepada PPID termasuk kewajiban dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.
3. Penyampaian informasi publik dari bidang-bidang ke PPID belum berjalan optimal sehingga informasi yang tersaji di media publikasi informasi kurang update
4. Belum adanya record center yang menjadi pusat dokumen kearsipan, sehingga dalam proses pencarian informasi berupa hardcopy masih tersebar di bidang-bidang.
5. Masih terdapat pemohon informasi yang tidak melalui Layanan Informasi, namun langsung menuju ke bidang penghasil informasi, sehingga tidak ter-rekord di register pemohon informasi.

B. Rekomendasi :

1. sehingga perlu adanya sosialisasi tentang informasi publik baik yang boleh diberikan maupun tidak boleh diberikan kepada pemohon serta perlu adanya bintek penyusunan daftar informasi publik, informasi yang dikecualikan dan uji konsekuensi.
2. Perlu adanya kaderisasi Tim Pelaksana PPID agar amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat terwujud.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN PIt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800 / 03740 / 2018

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**PIt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengorganisir pelaksanaan kegiatan dibidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Pelaksanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan PIt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indornsia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

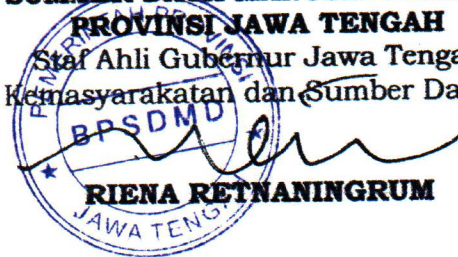
- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Informasi :
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala;
 - Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4). Informasi yang dikecualikan;
 - b. Pelayanan Informasi :

Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Dokumentasi dan Arsip :
 - Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada public;
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
 - Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik;
 - Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip, pelayanan informasi;
 - e. Pengelola Teknologi Informasi :
 - Pengelola Web Resmi Lembaga dan Webmail.
 - Pengelola Jaringan, Laboratorium Computer, Laboratorium Bahasa
 - Pengelola Server, Database dan Aplikasi.
 - Pengelola e-learning, CAT dan Evaluasi Online
 - Publikasi dan Media Sosial

- KETIGA : Tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 01 Maret 2018

**Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA
 BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA
 DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR : 800/03740/2018
 TANGGAL : 01 Maret 2018

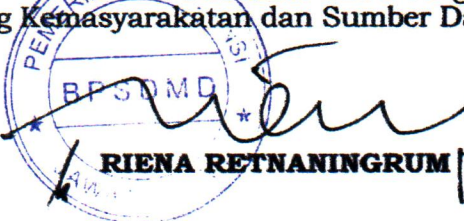
**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Riena Retnaningrum, SH	Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Hermoyo Widodo, SH, M. Hum	Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua Tim
3	<u>PENGELOLA INFORMASI :</u> Jati Wiyono, SH, M.Si	Kasubbag Program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
4	Kurniawan Setyadi	Staf Subbag Program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kadek Kaniache Prabiwatini Sariasa, SH	Staf Subbag Program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Adji Suryapratama, SH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Rateh Aryani, SH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Dinar Kurniawan, SSTP	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Anggota
9	Sudibyو Budi Setyawan	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
10	Hendriyani Mukhtar, SE, M.Si	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
11	Jaka Munjihana, S.Pd	Staf Bidang Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Anggota
12	Yulan Samanta	Staf Bidang Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Anggota
13	Frienda Triastuti Ratnajati, SE	Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Anggota
14	Ita Kartika, S.Kom	Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Anggota

	<u>PELAYANAN INFORMASI :</u>		
15	Purwanto	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
16	Marini Hasid, SSTP	Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi & Penajminan Mutu	Anggota
17	Amanda Soraya, S.Psi	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
18	Rohmi Irma Astuti, SE	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Anggota
19	Hastin Afriani, SE	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
	<u>PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP</u>		
20	Moch. Faizin, S. Sos, MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
21	Ekawatiningsih, SPd	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Sunaristanto	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Lembani	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
	<u>PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</u>		
24	Sri Winarti, SE., Msi	Staf Subbag Program pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap Anggota
25	Susy Prihati Astuti, SH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Novian Heru Rubiyanto, SH	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian BPSDMD provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Muh Said, SH	Staf Bidang Sertifikasi Kompetensi & Penjaminan Mutu	Anggota
28	Gigih Dwi Haryono, SH	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Anggota
29	Mustari,SH, MH	Staf Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Anggota
	<u>PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI</u>		
30	Ismu Pandoyo,S.I.Kom	Staf Subbag Program pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Koordinator merangkap penanggung jawab Web Resmi Lembaga dan WebMail

31	Pungky Dharmawan SDA,A.Md	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab Jaringan
32	Antonius Agung Pratomo,S.Kom	Staf Subbag Program pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab Server, Database & Aplikasi
33	Aida Rosmaniar,S.Pd	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab E-learning,CAT & Evaluasi Online
34	Yanuar Alvin Arief, A.Md	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab Publikasi dan Media Sosial

**Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


RIENA RETNANINGRUM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN PIt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800 / 00092 / 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan PIt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 02 Januari 2018

**Pjt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						
a.	Visi dan Misi	Sekretaris	Kasubag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
b.	Struktur Organisasi dan Profil BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2016	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
c.	Sumber Daya Manusia yg dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai), Profil pejabat struktural dan LKHPN	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
d.	Tugas, wewenang dan fungsi	Sekretaris	Kasubag Program	2016	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
e.	Gambaran Umum	Sekretaris	Kasubag Program	2016	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
f.	Lokasi	Sekretaris	Kasubag Program	2016	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
2.	Informasi Tentang Profil PPID						
a.	SK PPID	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2018	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
b.	Maklumat	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2016	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
c.	Peraturan	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2018	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
d.	Kode Etik	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2015	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
e.	Telpon & Alamat	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2016	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
3.	Ringkasan Program dan Kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Sekretaris	Kabid, Kasubbid dan Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
b.	Penanggungjawab dan pelaksana program	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
c.	Target dan capaian program dan kegiatan	Sekretaris	Kabid, Kasubbid dan Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretaris	Kabid, Kasubbid dan Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
e.	Nilai anggaran	Sekretaris	Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
f.	Agenda penting BPSDMD	Sekretaris	Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
	Rencana rakor dll, pada SKPD, Kab/Kota pada	Sekretaris	Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
	TA 2018 - Rencana pelaksanaan Diklat - Agenda penting lainnya (sosialisasi, Sinkronisasi, lokakarya ,AKD)	Sekretaris	Kabid , Kasubbid dan Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
4.	Hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						
a.	Ringkasan informasi kinerja	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sekretaris	Kasubbag Program	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
5.	Laporan Keuangan						
a.	Laporan Realisasi Anggaran	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
b.	Neraca Keuangan	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
c.	Catatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
d.	Arus Kas	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
6.	Laporan Akhir Kegiatan Diklat	Sekretaris	Kabid & Kasubbid	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
7.	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Sekretaris	Sekretaris selaku PPID	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
8.	Pengumuman pengadaan barang dan jasa	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
	a.Rencana umum pengadaan barang dan jasa	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
	b.Pengumuman proses pengadaan	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
	c. Pengumuman pemenang lelang	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website

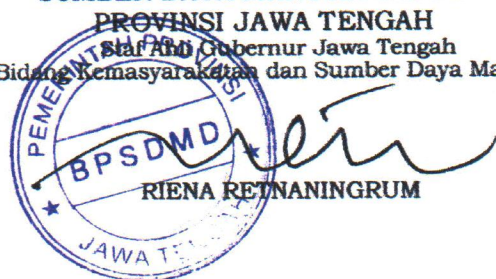
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Sekretaris	Kasubbag Program	2013	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
2.	Rencana Kerja (Renja) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2018	Sekretaris	Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
3.	Rencana Strategis (Renstra) Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018	Sekretaris	Kasubbag Program	2013	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
4.	Daftar Aset dan Inventaris	Sekretaris	Kasubbag Umum dan kepegawaian	2017	Softcopy & Hardcopy	5 Tahun	Website
5.	Rencana Kerja Tahunan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Sekretaris	Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website
6.	Petunjuk Pelaksanaan (Jukiak) Kegiatan	Sekretaris	Kabid, Kasubbid dan Kasubbag Program	2018	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website

D. WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosedur dini dan evakuasi keadaan darurat kebakaran gedung	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2017	Softcopy & Hardcopy	5 tahun	Website

Pt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Star Anu Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


RIENA RETNANINGRUM